



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Edy Rahmayadi**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **155195**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 12.134.950.000**

1. Tanah Seluas 5879 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 233 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
3. Tanah Seluas 1600 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/55 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1437 m2/548 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 3247 m2/129.4 m2 di KOTA BINJAI , HASIL SENDIRI Rp. 1.080.000.000
7. Tanah Seluas 3096 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
8. Tanah Seluas 364 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 41.860.000
9. Tanah Seluas 3766 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 433.090.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
11. Tanah Seluas 66178 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	193.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.067.562.690
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.396.212.690
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.396.212.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.